

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan..... 24
2. Dasar Hukum dan Syarat Kepailitan..... 27
3. Penyelesaian Perkara Kepailitan..... 30
 - a. Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga..... 30
 - b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung..... 34
 - c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali..... 38
4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kepailitan..... 40

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 44
2. Perdamaian (Akkord) Dalam Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 46
3. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 47
4. Restrukturisasi Utang Dalam Perdamaian..... 49
5. Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... 49

BAB III PUTUSAN KEPAILITAN DAN PERDAMAIAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PERUSAHAAN BUMN

A. Profile PT. Merpati Nusantara Airline (MNA)

1. Bidang Usaha.....	54
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	55
3. Sejarah Perusahaan.....	55
4. Kepemilikan Saham dan Kepengurusan.....	57
5. Anak Perusahaan.....	58
B. Profile PT. Dirgantara Indonesia (DI)	
1. Bidang Usaha.....	59
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	60
3. Sejarah Perusahaan.....	61
4. Kepemilikan Saham dan Kepengurusan.....	67
C. Kasus Posisi PT. Merpati Nusantara Airlines Putusan No.4/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.SBY	
1. Asal mula PKPU.....	69
2. Hasil putusan PKPU.....	73
D. Kasus Posisi PT. Dirgantara Indonesia Putusan No. 41/Pailit/2007/PN. Niaga/JKT.PST.	
1. Asal mula	79
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 /K/Pdt. Sus/2007	86

BAB IV AKIBAT HUKUM DIBATALKAN PUTUSAN PAILIT PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UUKPKPU)

A. Akibat hukum Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan debitur.....	90
---	----

B. Upaya yang dilakukan Perusahaan BUMN sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga.....	99
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP